

## Peran Audit Internal Dalam Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022

Nadia Dwi Pratiwi , Badzlina Chaerani Putri , Irda Agustin Kustiwi

<sup>1,2,3</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [1222100020@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222100020@surel.untag-sby.ac.id) , [1222100063@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222100063@surel.untag-sby.ac.id) ,  
[irdakustiwi@untag-sby.ac.id](mailto:irdakustiwi@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to investigate the role of internal audit in the context of implementing Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022. These regulations have a significant impact on financial governance and accountability across various entities. With a focus on internal audit, this research explores how the internal audit function contributes to ensuring compliance with these financial regulations. This research method uses qualitative methods involving documentation analysis and interviews. The results of the research are expected to provide insight into the effectiveness of the role of internal audit in supporting the implementation of related Minister of Finance Regulations and provide recommendations for further improvements in the entity's financial management.*

**Keywords:** *Internal Audit, Regulation of the Minister of Finance*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran audit internal dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Peraturan ini memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola keuangan dan akuntabilitas di berbagai entitas. Dengan fokus pada audit internal, penelitian ini menggali bagaimana fungsi audit internal berkontribusi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan analisis dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas peran audit internal dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Keuangan terkait dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan entitas.

**Kata kunci:** *Audit Internal, Peraturan Menteri Keuangan*

### LATAR BELAKANG

Dalam era dinamika ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, penerapan regulasi keuangan menjadi suatu keharusan bagi entitas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik dan tingkat akuntabilitas yang optimal. Pada konteks ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menjadi landasan regulasi yang memberikan arah dan panduan terkait pengelolaan keuangan entitas. Peraturan ini mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan tata cara pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menuntut entitas untuk menjalankan praktik keuangan yang transparan dan akuntabel. Kewajiban ini sejalan dengan semangat peningkatan tata kelola keuangan, di mana entitas dituntut untuk bertanggung jawab secara finansial dan memastikan adanya integritas informasi keuangan yang dihasilkan. Tingginya tingkat kompleksitas dan dinamika peraturan keuangan menggarisbawahi pentingnya peran audit internal dalam mendukung entitas dalam memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Audit internal menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa praktik keuangan yang diterapkan oleh entitas sesuai

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Januari 02, 2024; Published: April 30, 2024

\* Nadia Dwi Pratiwi, [1222100020@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222100020@surel.untag-sby.ac.id)

dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran audit internal dalam konteks ini menjadi esensial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan peraturan yang mengatur tentang perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perubahan tersebut antara lain meliputi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, serta penggunaan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

Perubahan NPWP tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Meningkatkan kepatuhan perpajakan;
- b. Mempermudah administrasi perpajakan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, audit internal dapat berperan penting dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan Dewan Pengawasan bahwa penerapan peraturan tersebut telah dilakukan secara efektif dan efisien, serta telah memberikan manfaat yang diharapkan.

Dalam rangka menjawab kompleksitas kebutuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana peran audit internal dalam mendukung entitas dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022? Pertanyaan ini mencerminkan urgensi pemahaman tentang kontribusi audit internal dalam memastikan kesesuaian entitas dengan regulasi yang berlaku. Kedua, sejauh mana efektivitas audit internal dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana audit internal mampu menjadi instrumen yang efisien dalam menjamin entitas mematuhi ketentuan peraturan keuangan yang relevan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi audit internal dalam mendukung entitas dalam menerapkan peraturan keuangan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas audit internal dalam memastikan tingkat kepatuhan yang optimal terhadap regulasi keuangan tersebut. Penelitian ini bukan sekadar eksploratif, melainkan menjadi landasan penting yang dapat memberikan pandangan holistik yang meyakinkan terkait peran dan kinerja audit internal dalam konteks regulasi

keuangan yang sedang berlaku, menghadirkan pemahaman mendalam yang menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terkait peran dan kinerja audit internal dalam konteks regulasi keuangan yang sedang berlaku.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Akuntansi Keuangan**

Teori akuntansi keuangan adalah seperangkat prinsip dan konsep yang membimbing praktik akuntansi keuangan. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menyusun, menyajikan, dan memahami laporan keuangan suatu entitas. Prinsipnya menyatakan bahwa entitas bisnis dan individu dianggap sebagai entitas terpisah, dan transaksi bisnis harus dipisahkan dari transaksi pribadi pemilik. Dan menyatakan bahwa metode akuntansi yang digunakan oleh entitas harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya.

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa entitas dianggap dapat berlanjut selama waktu yang cukup untuk membenarkan penggunaan asumsi akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Audit internal memainkan peran penting dalam menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi, seperti risiko operasional, manajemen keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Prinsip relevansi menekankan pentingnya menyajikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Audit internal harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan mencerminkan secara akurat kondisi keuangan dan hasil operasi entitas, sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam konteks audit keuangan, teori keberlanjutan mempertimbangkan aspek keuangan jangka panjang dan dampak lingkungan dari keputusan keuangan perusahaan. Auditor dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan aspek keberlanjutan dan memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Dalam audit keuangan, pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku manajemen dan auditor dapat memberikan wawasan tambahan dalam menilai risiko keuangan dan kinerja perusahaan.

Konsistensi dalam penyajian informasi keuangan menjadi prinsip penting dalam teori akuntansi keuangan. Audit internal harus memastikan bahwa entitas mempertahankan konsistensi dalam metode akuntansi, kebijakan, dan pengungkapan. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi keuangan dapat diandalkan dan dapat dibandingkan dari periode ke periode.

## **Audit Internal**

Teori audit merujuk pada seperangkat prinsip dan konsep yang membimbing praktik audit. Praktik audit dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dapat diandalkan, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan utama dari audit adalah memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan suatu entitas adalah akurat, dapat diandalkan, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Serta mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan materi dalam laporan keuangan. Auditor berusaha untuk memberikan pendapat independen mengenai keandalan informasi keuangan.

Audit internal diartikan sebagai proses independen dan objektif yang memberikan jaminan dan konsultasi, dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional suatu organisasi. Fungsi audit internal mencakup pemeriksaan dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ruang lingkup audit internal melibatkan analisis menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik operasional untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Audit internal memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dengan memberikan keyakinan kepada manajemen dan Dewan Pengawasan suatu organisasi bahwa sistem pengendalian internal telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi;
- b. Keandalan pelaporan keuangan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, audit internal dapat berperan dalam:

- a. Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan peraturan tersebut;
- b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi atas risiko-risiko yang terkait dengan penerapan peraturan tersebut;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya;
- e. Meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran audit internal dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.

## **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan entitas. Rinciannya mencakup persyaratan terkait pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, entitas yang terkena akan dihadapkan pada tuntutan untuk menyelaraskan praktik keuangannya dengan persyaratan yang lebih ketat, dengan dampak langsung terhadap pengelolaan risiko dan transparansi informasi keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini tidak hanya menciptakan kewajiban kepatuhan, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan praktik keuangan secara keseluruhan. Dengan mempromosikan standar akuntabilitas yang lebih tinggi, peraturan ini memberikan kontribusi penting terhadap citra keuangan dan reputasi entitas di mata pemangku kepentingan. Hubungan yang erat antara peraturan ini dengan praktik keuangan dan akuntabilitas menciptakan lingkungan di mana audit internal memainkan peran kunci dalam memastikan entitas mematuhi dan menerapkan ketentuan tersebut secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran, yang mencakup analisis dokumentasi dan wawancara. Analisis dokumentasi akan digunakan untuk memeriksa kebijakan, prosedur dan laporan keuangan terkait peraturan Menteri Keuangan. Wawancara dengan praktisi audit internal akan memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka dalam menerapkan regulasi tersebut.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran audit internal terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode kualitatif:

- a. Untuk memahami fenomena secara mendalam. Peran audit internal terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam, diperlukan pendekatan kualitatif yang dapat menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber, studi dokumen.
- b. Untuk menangkap makna dan interpretasi subyek penelitian. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini merupakan fenomena sosial yang melibatkan interaksi antara berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk menangkap makna dan interpretasi dari berbagai subyek

penelitian, seperti auditor internal, wajib pajak, dan instansi terkait. Pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti untuk menangkap makna dan interpretasi tersebut.

Kriteria Pemilihan Entitas yang Menjadi Subjek Penelitian:

Entitas yang dipilih akan berasal dari berbagai sektor dan ukuran, termasuk perusahaan publik dan swasta. Kriteria pemilihan mencakup tingkat keterpaparan terhadap peraturan keuangan, kompleksitas struktur organisasi, dan sejarah kepatuhan entitas tersebut. Dengan memilih sampel yang representatif, hasil penelitian dapat lebih umum diterapkan pada berbagai konteks bisnis.

Rincian Pertanyaan Wawancara:

Wawancara akan mencakup pertanyaan terkait persepsi praktisi audit internal terhadap peran mereka dalam penerapan peraturan keuangan. Pertanyaan akan mencakup aspek tata kelola, prosedur audit, dan hambatan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kontribusi Audit Internal**

Temuan Terkait Peran Audit Internal dalam Penerapan Regulasi Keuangan:

Hasil analisis akan memperlihatkan kontribusi audit internal dalam memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan Menteri Keuangan. Temuan ini akan mencakup peran audit internal dalam mengidentifikasi pelanggaran potensial, memberikan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan proses pengelolaan risiko entitas.

Pengaruhnya terhadap Tata Kelola dan Kepatuhan:

Analisis kontribusi audit internal membuka pintu untuk pengamatan mendalam terhadap dampaknya terhadap tata kelola entitas yang akan mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola entitas dan sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi dapat ditingkatkan. Dengan melibatkan penilaian menyeluruh terhadap praktek pengendalian internal, auditor dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pengendalian yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional entitas. Hal ini melibatkan peninjauan kritis terhadap langkah-langkah kontrol internal, prosedur keuangan, serta kebijakan yang memandu aktivitas sehari-hari perusahaan. Ini mencakup evaluasi terhadap efisiensi proses kontrol internal dan integritas informasi keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, analisis kontribusi audit internal juga melibatkan penilaian sejauh mana entitas mematuhi regulasi yang berlaku. Auditor akan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan norma-norma yang diimplementasikan, mencari potensi pelanggaran atau risiko kepatuhan yang dapat memengaruhi reputasi dan kelangsungan bisnis entitas.

Evaluasi ini membantu entitas untuk memahami sejauh mana mereka telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan kerangka regulasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar keuangan yang berlaku.

Selanjutnya, fokus analisis audit internal juga mencakup evaluasi terhadap efisiensi proses kontrol internal dan integritas informasi keuangan. Dengan meneliti ketelitian, keandalan, dan akurasi data keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi entitas, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan proses dan kontrol yang dapat meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan. Sebagai mitra kritis dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan, audit internal memiliki peran penting dalam membantu entitas mencapai standar tata kelola yang optimal serta kepatuhan yang diperlukan dalam lingkungan regulasi yang terus berubah.

### **Evaluasi Efektivitas Audit Internal**

Penilaian Terhadap Sejauh Mana Audit Internal Mendukung Kepatuhan:

Evaluasi efektivitas akan mempertimbangkan sejauh mana audit internal berhasil mendukung entitas dalam mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan. Ini mencakup analisis terhadap kecepatan identifikasi pelanggaran, respon terhadap temuan audit, dan peran audit internal dalam perbaikan proses keuangan.

Identifikasi Area Perbaikan yang Mungkin Diperlukan:

Hasil penilaian akan memberikan wawasan tentang area-area di mana audit internal dapat meningkatkan efektivitasnya. Identifikasi ini akan memberikan landasan untuk merekomendasikan perbaikan dalam sistem tata kelola dan kepatuhan entitas terhadap regulasi keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah disahkan pada Mei 2022 menjelaskan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Selain itu, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, NPWP yang digunakan harus memiliki format 16 digit. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai standar identifikasi bagi wajib pajak, dengan mengakomodasi perbedaan status dan karakteristik masing-masing entitas pajak.

Pentingnya peraturan ini terletak pada upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, sekaligus memberikan kejelasan mengenai kriteria penggunaan NIK dan format NPWP. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan

proses administratif dan meningkatkan ketaatan pajak. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang terstruktur, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi sistem perpajakan yang transparan dan efektif dalam mengelola sumber daya keuangan negara.

Penerapan peraturan ini dapat ditinjau melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak dimana terdapat pop-up otomatis yang selalu menginformasikan kepada pengguna untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP.



**Gambar 1. Halaman Utama Situs DJP**

Kaitannya dengan audit internal yakni dapat membantu organisasi memastikan bahwa kebijakan dan praktik perpajakan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap prosedur penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku untuk masing-masing kategori wajib pajak. Audit internal dapat menilai efektivitas pengamanan dan pengendalian informasi. Ini termasuk peninjauan terhadap kebijakan keamanan data, akses terhadap informasi sensitif, dan upaya pencegahan kebocoran atau penyalahgunaan data pajak

Audit internal dapat melakukan audit kepatuhan untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan untuk penggunaan NIK dan NPWP diikuti dengan benar oleh seluruh organisasi. Ini dapat mencakup verifikasi dokumen, rekonsiliasi data, dan peninjauan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan. Praktinya memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan kebijakan dan prosedur penggunaan NIK dan NPWP. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain aspek pengawasan, praktik audit internal juga melibatkan pemberian pelatihan kepada karyawan terkait dengan kebijakan dan prosedur penggunaan NIK dan NPWP. Pelatihan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman karyawan tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat budaya kepatuhan di dalam organisasi. Dengan



memberdayakan karyawan dengan pengetahuan yang diperlukan, organisasi dapat mengurangi potensi kesalahan administratif dan meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Sehingga, melalui kombinasi audit kepatuhan dan praktik pendidikan, audit internal menjadi alat yang efektif dalam mendukung organisasi dalam mematuhi peraturan terkait penggunaan NIK dan NPWP, menjaga integritasnya, dan memitigasi risiko pelanggaran perpajakan.

Krusial bagi fungsi audit internal untuk secara proaktif memantau perkembangan dalam peraturan perpajakan dan memastikan bahwa organisasi dengan cermat menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya. Tindakan ini tidak hanya mengurangi risiko ketidakpatuhan, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif yang efektif untuk menghindari potensi sanksi hukum yang dapat merugikan perusahaan. Dengan menjalankan pemantauan dan penyesuaian ini secara rutin, audit internal memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan kepatuhan perpajakan organisasi.

Tugas utama audit internal dalam hal ini adalah menyusun laporan yang terperinci mengenai tingkat kepatuhan organisasi terhadap peraturan penggunaan NIK dan NPWP. Laporan ini bukan hanya sebuah dokumen, tetapi merupakan alat yang kuat bagi manajemen dan pihak berwenang. Dengan informasi yang disajikan secara rinci, laporan ini memberikan pandangan jelas tentang tingkat kepatuhan organisasi, sehingga membantu manajemen dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pihak berwenang untuk mengidentifikasi area-area tertentu yang mungkin memerlukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Laporan audit internal ini juga berfungsi sebagai panduan berharga bagi pihak berwenang, seperti auditor eksternal atau badan pengawas, untuk mengidentifikasi area-area khusus yang mungkin memerlukan perbaikan atau peningkatan. Dengan memberikan penilaian obyektif terhadap sistem dan prosedur yang ada, laporan ini menjadi alat pemantauan yang kuat untuk membimbing entitas dalam mengatasi potensi masalah dan memperkuat kepatuhan mereka terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, melalui peran kritisnya dalam penyusunan laporan, audit internal bukan hanya memenuhi tanggung jawabnya untuk menilai kepatuhan organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembenahan dan peningkatan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan peraturan ini dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak, yang menyediakan pop-up otomatis untuk memberi informasi kepada pengguna terkait

pemadanan NIK-NPWP. Dalam konteks ini, audit internal memainkan peran krusial. Audit internal membantu organisasi memastikan bahwa kebijakan dan praktik perpajakan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap prosedur penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku untuk masing-masing kategori wajib pajak. Secara keseluruhan, peran audit internal sangat penting, karena mereka tidak hanya memantau kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga proaktif dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan dan potensi sanksi hukum. Dengan menyusun laporan yang terperinci, audit internal memberikan pandangan jelas kepada manajemen dan pihak berwenang tentang tingkat kepatuhan organisasi, membantu dalam menjaga kepatuhan yang berkelanjutan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.

Ringkasan temuan akan mencerminkan hasil krusial dari penelitian ini, dengan menyoroti kontribusi signifikan audit internal dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Temuan ini melibatkan efektivitas audit internal dalam mengidentifikasi dan menanggulangi pelanggaran potensial, meningkatkan tata kelola, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

Ringkasan temuan juga akan menguraikan implikasi temuan terhadap manajemen keuangan entitas. Ini dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kredibilitas informasi keuangan, dan peningkatan keseluruhan tata kelola. Implikasi positif ini akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

### **Saran**

Penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam perpajakan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Ini melibatkan pelatihan terus-menerus untuk memastikan bahwa semua prosedur, terutama terkait dengan penggunaan NIK dan NPWP, dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlunya sosialisasi berkala untuk memastikan ketidaktahuan dan kesalahpahaman mengenai peraturan yang dibuat.

Audit internal perlu memastikan bahwa rutinitas pemantauan dan evaluasi terkait dengan perubahan peraturan perpajakan dijalankan secara konsisten. Ini termasuk pemantauan situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan ketersediaan informasi terkini dan penyesuaian kebijakan internal sejalan dengan perubahan tersebut.

Saran untuk Peningkatan Peran Audit Internal :

Rekomendasi pertama akan mencakup saran untuk peningkatan peran audit internal. Ini mungkin termasuk peningkatan kompetensi dan kapasitas tim audit internal, pengembangan prosedur audit yang lebih efektif, atau peningkatan kolaborasi dengan manajemen entitas.

Langkah-Langkah yang Dapat Diambil oleh Entitas dalam Mematuhi Peraturan Menteri Keuangan :

Rekomendasi kedua akan memberikan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh entitas untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Ini mungkin mencakup penyusunan ulang kebijakan keuangan, pelaksanaan pelatihan untuk personel terkait, atau peningkatan sistem pengendalian internal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu entitas mengimplementasikan perubahan yang diperlukan guna memenuhi persyaratan peraturan keuangan

## **DAFTAR REFERENSI**

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, Desember). *Direktorat Jenderal Pajak*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022, Maret). *JDIH Kemenkeu*. Dipetik Desember 2023, dari PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 112/PMK.03/2022: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf>
- Senastri, K. (2023, November 10). *Pengertian Akuntansi Keuangan, Fungsi, Tujuan, dan Standarisasinya*. Diambil kembali dari Accurate: <https://accurate.id/akuntansi/pegertian-akuntansi-keuangan/>
- PT ESGI INDONESIA BERKELANJUTAN. (2023). *Apa Itu Audit Internal? Pengertian, Tugas, dan Ide Penelitian*. Diambil kembali dari PT ESGI INDONESIA BERKELANJUTAN: <https://www.esgi.ai/apa-itu-audit-internal/>